NEWSLETTER
SNI AWARD
NATIONAL QUALITY AWARD OF INDONESIA

Volume II/1 | Edisi Januari - Maret 2021

Membangkitkan UMKM Melalui Program CSR

CSR mendukung perekonomian kerakyatan

UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata

SANDIAGA UNO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ketua Dewan Juri SNI Award

Bangkitkan UMKM Melalui Pendampingan Komprehensif

PT PETROKIMIA GRESIK

Peraih Penghargaan SNI Award 2019
peringkat grand platinum

PENANGGUNG JAWAB

Zakiyah
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

PEMIMPIN REDAKSI

Heru Suseno

REDAKTUR PELAKSANA

Tintin Prihatiningrum

EDITOR

Muhamad Wibowo Sukendar
Chalid Alonto

TIM PENYUSUN

Bagus Muhammad Irvan
Ratih Paramithasari
Paulus Rian
Celly Silviana

Sampul :
Sandiaga Uno. (Foto: Instagram/Sandiaga Uno)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Gedung I BPPT, Lantai 12
Jl. M.H. Thamrin No.8
Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340
Telp/Fax : (021) 3927422 /(021)3927527
bsn.go.id

NEWSLETTER SNI AWARD

The National Quality Award of Indonesia

Volume 2/1 Edisi Januari - Maret 2021

DAFTAR ISI :

Membangkitkan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata 1

Bangkitkan UMKM Melalui Pendampingan Komprehensif..... 4

Standardisasi dalam Mendukung Transformasi Perusahaan sebagai IHMC..... 6

Foto : pedulicovid19.kemenparekraf.go.id

MEMBANGKITKAN UMKM DAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KAWASAN PARIWISATA

Oleh : Sandiaga Uno

■ Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kondisi perekonomian global, *World Bank* menyatakan dalam laporan Prospek Ekonomi Global terbaru bahwa dampak krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini lebih buruk dari krisis di dunia yang pernah terjadi sejak tahun 1870 (www.voaindonesia.com). *World Bank* memprediksi bahwa dunia mengalami kontraksi ekonomi, yaitu sebesar minus 5,2% tahun 2020. Dalam *Outlook* Ekonomi Juni 2020, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan perekonomian – dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) - global turun sebesar 6%, dan bahkan mencapai angka negatif 7,6% dengan perkiraan gelombang pandemi kedua terjadi pada akhir 2020. IMF dalam *Outlook* Ekonomi Bulan Juni 2020 memproyeksikan penurunan PDB global sebesar 4,9% pada 2020.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut merasakan dampak pandemi Covid-19 ini, dimana pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor utama perekonomian nasional. Namun kita semua harus optimis, dengan kesungguhan dari Pemerintah dan tentunya didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, perekonomian nasional khususnya industri ekonomi kreatif akan kembali bangkit dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Sesuai dengan konsensus lembaga ekonomi global, tahun 2021 Indonesia akan mulai mengawali proses pemulihan ekonomi. Prediksi *World Bank* ekonomi Indonesia 2021 tumbuh Positif 3.1%, sementara IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi di angka 4,8% pada 2021 dan 6% pada 2022. Bank Indonesia merilis prakiraan pertumbuhan ekonomi yang senada pada angka 4.8% -5.8%. Artinya kita semua harus bersiap tidak hanya menunggu, namun justru harus aktif mempercepat kebangkitan ekonomi, lewat pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu agen pertumbuhan ekonomi dan pembuka lapangan kerja adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid- 19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% – 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional.

Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. UMKM dapat menjadi garda terdepan di dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata adalah penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara. Namun, pandemi membuat banyak destinasi wisata di Indonesia amat terdampak. Oleh karena itu, sektor pariwisata harus bisa bangkit kembali di era kenormalan baru saat ini dengan tetap disiplin dalam menjaga Protokol Kesehatan. Dalam mengembangkan destinasi pariwisata, harus seiring dengan program pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif pada wilayah masing-masing, karena setelah lelah berwisata menikmati keindahan alam, tentunya para wisatawan akan mencari wisata kuliner, belanja produk lokal dan lain-lain.

Pemerintah sudah menyiapkan beragam skema pemulihan ekonomi nasional. Terdapat skema khusus untuk membangkitkan usaha mikro, termasuk yang ada di wilayah destinasi wisata. Salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, yang merupakan hibah sebesar Rp2,4 juta per orang, untuk membantu permodalan yang tergerus akibat dampak pandemi. Terdapat tiga masalah yang membelit UMKM selama ini, dan makin terlihat kala pandemi melanda. Yaitu, permodalan, perijinan usaha, hingga masalah logistik. Untuk membangkitkan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di kawasan pariwisata.

Selain itu pemerintah juga telah memberikan dukungan dalam penyusunan pedoman dan sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan / *Clean, Health, Safety, Environment* (CHSE) untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di 34 propinsi. Dukungan CHSE ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 tahun 2020. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang tertarik untuk mendapatkan dukungan ini dapat mendaftarkan usahanya melalui laman situs **chse.kemenparekraf.go.id**. Pada tahun 2020 sendiri sudah ada sekitar 6.776 usaha yang telah teraudit dan sebanyak 5.863 usaha tersertifikasi.

Keberadaan UMKM sebagai penopang sektor pariwisata, penting dalam memastikan kesiapan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif untuk segera bangkit. Hanya saja, diakui masih ada kendala yang membelenggu pelaku UMKM di banyak destinasi pariwisata, diantaranya, mereka masih mengambil bahan baku dari daerah lain, hal ini menunjukan kurang optimalnya rantai pasok yang memberdayakan usaha lokal sehingga masih adanya ketergantungan pada daerah lain.

Inovasi dan kreatifitas adalah ruh pembangkit ekonomi kreatif, sementara ekonomi adalah esensial dalam mewujudkan kesejahteraan.

Harus ada kolaborasi antar pihak di sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif, untuk membangkitkan kembali kondisi perekonomian di destinasi pariwisata.

Sandiaga Uno

Foto : kemenparekraf.go.id

Pelaku usaha ekonomi kreatif diharapkan ***Always Be Creative*** dengan mengedepankan inovasi dan teknologi agar mampu bertahan dan terus menerus berkembang. Salah satu bentuk adaptasi dilakukan dengan kebiasaan melakukan aktivitas secara daring *(online),* oleh karena itu kebutuhan digitalisasi mutlak diperlukan dalam dunia industri kreatif, baik dalam hal manajemen, *capacity building, quality testing* serta *track and trace* sistem logistik.

Pandemi Covid-19 telah mempercepat adaptasi terhadap digitalisasi yaitu semakin banyaknya orang yang terbiasa menghadiri seminar/event/pertunjukkan atau transaksi jual beli secara darng, hal ini menjadi peluang tersediri bagi industri kreatif di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf /Baparekraf) terus berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait dalam menyambut kenormalan baru industri kreatif di Destinasi Pariwisata.

Hal ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi pelaku industri ekonomi kreatif dalam upaya menjaga keberlangsungan usahanya. Dalam membangkitkan perekonomian UMKM sangat diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan pelaku usaha /UMKM sendiri. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam promosi, revitalisasi bahan baku, mengintensifkan bantuan modal usaha dan menyediakan pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha/UMKM harus bisa mengembangkan kapasitas usaha atau *self development*, sedangkan akademisi dari perguruan tinggi membantu meningkatkan kualitas pelaku usaha/UMKM. (*)

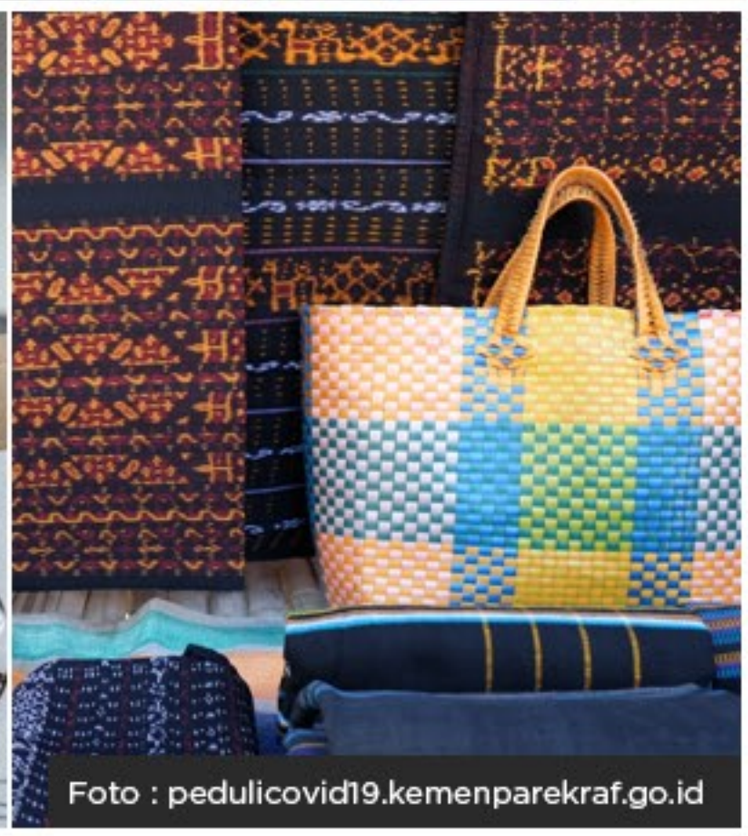

Foto : pedulicovid19.kemenparekraf.go.id

Foto : Dokumen PT Petrokimi Gresik

BANGKITKAN UMKM MELALUI PENDAMPINGAN KOMPREHENSIF

Oleh : Humas PT Petrokimia Gresik

■ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang super besar bagi pertumbuhan konomi di Indonesia. Sektor ini merupakan pemeran utama dalam penyerapan tenaga kerja domestik, selain itu juga menjadi pendorong pemerataan ekonomi. Beda dengan perusahaan besar yang dominasinya berada di ibu kota atau pusat kota saja.

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia pun menyadari peran UMKM ini. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi sebagai *agent of development*, Petrokimia Gresik berupaya membangun UMKM melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dengan memberikan bantuan pinjaman modal, serta pendampingan usaha secara komprehensif.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan bahwa, sebagaimana Petrokimia Gresik yang memberikan solusi sektor agroindustri mulai dari hulu hingga hilir, komitmen tersebut juga diimplementasikan untuk memajukan UMKM di tanah air.

Pertama, Petrokimia Gresik membangkitkan UMKM melalui bantuan pinjaman modal. Anggaran kemitraan yang disalurkan Petrokimia Gresik terbilang tinggi tiap tahunnya. Dimana tahun tahun 2016, Petrokimia Gresik sudah menyalurkan Rp48,5 miliar untuk 3.836 pelaku usaha, kemudian tahun 2017 kembali memberikan pinjaman modal sebesar Rp49,2 miliar (3.075 pelaku usaha), tahun 2018 senilai Rp43,7 miliar (2.296 pelaku usaha), dan di tahun 2019 sebesar Rp45,98 miliar (2.117 pelaku UMKM).

Pada tahun 2020, Petrokimia Gresik mengucurkan dana CSR sebesar Rp41,8 miliar untuk membantu pengembangan 1.579 pelaku UMKM. Angka ini mencapai 80,1% dari anggaran CSR sebesar Rp51,8 miliar. Sedangkan jika ditotal mulai tahun 2016 hingga sekarang sudah ada 12.903 pelaku usaha atau UMKM yang Petrokimia Gresik bantu dengan total anggaran lebih dari Rp229,18 miliar. Pinjaman modal tersebut banyak diberikan kepada UMKM di Jawa Timur. Sebagian juga dari Blora (Jawa Tengah), kemudian Sleman, Bantul, serta Kulon Progo (Yogyakarta).

Kedua, dalam mendukung pemerintah membangkitkan pertumbuhan UMKM nasional, Petrokimia Gresik juga memberikan pendampingan usaha, diantaranya membantu pelaku UMKM memiliki produk berkualitas dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Program ini dimulai pada tahun 2019 dengan mengikutkan 2 (dua) mitra binaan di sektor industri batik dari Kabupaten Bangkalan. Keduanya adalah Zulpah Batik dan CV Vatur Jaya. Berkat program sertifikasi ini, usaha dua UMKM mitra binaan tersebut terus mengalami kemajuan hingga sekarang.

Ketiga, Petrokimia Gresik juga memberikan pendampingan dalam memasarkan produk UMKM yang telah menjadi mitra binaan, diantaranya melalui sejumlah event pameran dan pelatihan pemasaran secara daring, seperti pembuatan laman situs. Ini dilakukan agar UMKM dapat memiliki pasar yang lebih luas, dan mampu mengikuti perubahan cara belanja pasar di era yang serba digital ini. (*)

Dokumentasi foto kegiatan CSR PT Petrokimia Gresik

Sejalan dengan kemajuan perusahaan, kami juga ingin menebarkan manfaat lebih banyak lagi pada tiap lapis masyarakat. Semoga peran Petrokimia Gresik bagi sektor UMKM dapat membantu dalam pemulihan perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19 yang hingga saat ini masih ada di sekitar kita.

Dwi Satriyo Annurogo

Foto : PT. TWC

STANDARISASI DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI PERUSAHAAN SEBAGAI IHMC*

Oleh : Humas PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

■ Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kawasan Cagar Budaya. Dengan menerima Penyertaan Modal Negara RI sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1980 (PP Nomor 7 tahun 1980) dan pada tahun 1993 (PP Nomor 52 tahun 1993).

Sebagai Perusahaan BUMN yang memiliki penugasan spesifik dalam bidang kawasan Cagar Budaya, TWC memiliki tanggung jawab diantaranya pengusahaan dan pemanfaatan atas kawasan diluar zona situs (zona 1) yang mana disebut zona 2 dalam bentuk taman wisata dan fasilitas pendukungnya dengan tetap memperhatikan pelestarian situs Cagar Budaya tersebut. "bagi TWC, penugasan atau kewenangan ini adalah suatu tugas, dengan tanggung jawab yang berat untuk turut menjaga Warisan Budaya yang dimiliki Indonesia bahkan Internasional" tutur Edy Setijono atau Tio, panggilan akrab Direktur Utama. Dalam memimpin Perusahaan, Direktur Utama didukung oleh 3 (tiga) Direktur lain yaitu Palwoto (Direktur Keuangan, SDM & Investasi), Mardiyono Nugroho (Direktur Teknik & Infrastruktur) dan Hetty Herawati (Direktur Pemasaran dan Pelayanan) serta Jajaran Dewan Komisaris yaitu Kacung Maridjan (Komisaris Utama), Riyatno (Komisaris), Jeanne Chyntia Lay (Komisaris Independen) serta organ komite audit dan komite Risiko Remunerasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan memiliki beberapa unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Prambanan, Taman Wisata Ratu Boko, Sendratari, Ramayana, Prambanan, Manohara Resto, Boko Resto, Royal Besaran Resto di kompleks ex Pabrik Gula Colomadu, Karanganyar, serta yang baru selesai dibangun pada tahun 2020 adalah Hotel *The Manohara Yogyakarta* yang terletak di Jl Affandi, Gejayan, Yogyakarta. TWC juga memiliki Anak Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendukung pariwisata yaitu PT Bhumi Visatanda (BHIVA). Dalam upaya mendukung integrasi pariwisata di kawasan Joglosemar, TWC berkontribusi dengan bersama-sama melakukan revitalisasi kawasan ex. Pabrik Gula Colomadu di Karanganyar, Jawa Tengah bersama konsorsium BUMN dan Anak Perusahaan BUMN (PTPN, PP, Patra Jasa, PP Property, Jasa Marga Property) untuk destinasi pariwisata baru, serta berproses dalam mengintegrasikan ekosistem pariwisata Joglosemar melalui integrasi Sistem Informasi berbasis IT guna penghubung antar destinasi dan sarana pendukungnya.

Aktivitas TWC sebagai bagian dari upaya transformasi Perusahaan menuju Indonesia *Heritage Management Corporation* (IHMC) sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024. Dengan Visi "Menjadi perusahaan pengelola dan pengembang Cagar Budaya dan Budaya yang berstandar Internasional",

*Indonesia Heritage Management Corporation

TWC terus berbenah terutama dalam merespon dinamika bisnis dan pasar yang berkembang dalam era digitalisasi dan dukungan SDM yang profesional. "Yang diperlukan dalam transformasi Perusahaan adalah kelincahan dalam berbisnis yang dikuatkan oleh pelayanan, sistem kerja dan proses bisnis yang memenuhi standar dan juga didukung internal audit yang kuat, sehingga dengan terpenuhinya 3 *(three) lines models* diharapkan bisnis yang sehat dapat dicapai dan tentu market sangat membutuhkan bisnis yang seperti itu" ucap Hetty Herawati. "Tentu dengan didukung SDM profesional yang mengedepankan AKHLAK akan semakin mendukung bisnis sehat itu" tambah Palwoto.

Standar yang telah diterapkan TWC diantaranya adalah ketentuan atau SOP mengenai proses bisnis Perusahaan, Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta kebijakan mutu yang tertuang dalam sertifikasi SNI ISO 9001:2015 pada unit usaha dan fungsi kontrol dilakukan dengan standar SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. "Dalam merespon era digitalisasi, Divisi IT dibawah direktorat Teknik dan Infrastruktur meningkatkan infrastruktur IT serta melakukan pengukuran kematangan melalui IT *Maturity Level Index* dan nantinya pada tahun 2021 direncanakan akan dilakukan sertifikasi standar SNI ISO 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi" tutur Mardiyono Nugroho yang membidangi Infrastruktur dan IT.

TWC selama ini telah bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mana terus memberikan pendampingan dalam TWC menetapkan standar. Saat ini, BSN juga turut memberikan pendampingan kepada mitra binaan TWC dalam meningkatkan kualitas produk dan standar UMKM.

Pada tahun 2019, TWC berhasil meraih salah satu penghargaan SNI AWARD yaitu medali Perunggu. Penghargaan tersebut tentu sangat membanggakan dikarenakan saat itu TWC baru pertama kali mengikuti ajang SNI AWARD dan langsung menerima award perunggu. Hal tersebut menjadi ukuran dan langkah awal untuk TWC terus berinovasi dalam mempertahankan standar dan meningkatkan standar lain yang diperlukan dalam proses bisnis serta transformasinya. (*)

TWC meyakini proses bisnis dan pendukung yang terstandar disertai dengan pendampingan orang-orang yang berkompeten dalam standardisasi tentu sangat berpengaruh dalam menjadikan TWC kedepannya semakin mantap dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi bisnis terhadap market yang dinamis

Edy Setijono

SNI Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional kepada perusahaan atau organisasi (BUMN, swasta, pendidikan, UMKM) yang dinilai paling baik dan konsisten dalam menerapkan SNI. SNI Award menjadi penghargaan yang bergengsi, karena sistem penilaian SNI Award yang ketat dan dilakukan oleh Tim Evaluator dan Tim Dewan Juri yang independen, imparsial, dan kompeten dibidangnya. Sebagai info tambahan, seluruh proses seleksi, peserta SNI Award tidak dipungut biaya.

Ada empat peringkat penghargaan SNI Award, Platinum, Emas, Perak dan Perunggu, bagi peraih platinum tiga kali berturut-turut akan mendapatkan penghargaan Grand Platinum.